

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara berasal dari penerimaan pajak. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia serta warga negara asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Pajak telah menjadi tulang punggung penggerak roda pembangunan yang dominan. Alokasi dana pajak digunakan untuk pembangunan dan bidang-bidang lain, seperti infrastruktur negara, fasilitas umum, dan dana sosial negara, dengan tujuan membantu program-program pemerintah dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan. Selain itu, pajak juga dapat digunakan sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di segala bidang. Jadi, bisa dikatakan pajak juga ikut berperan dalam menyejahterakan rakyat Indonesia (sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan).

Tabel 1.1

Realisasi SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi

Realisasi SPT Tahunan PPh Badan			
	Perusahaan di Indonesia	Potensi SPT Tahunan PPh Badan	Realisasi SPT Tahunan PPh Badan (April 2011)
Jumlah	22,300,000	12,900,000	466,000

Tabel 1.1 (Lanjutan)
Realisasi SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi

Rasio SPT Tahunan PPh Badan terhadap Total Badan Usaha	2,09 %		
Rasio SPT Tahunan PPh Badan terhadap Kelompok Badan Usaha	3,61 %		
Realisasi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi			
	Pekerja di Indonesia	Potensi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	Realisasi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
Jumlah	110,000,000	50,000,000	8,500,000
Rasio SPT Tahunan PPh Orang Pribadi terhadap Total Pekerja Aktif	7,73 %		
Rasio SPT Tahunan PPh Orang Pribadi terhadap Kelompok Pekerja Aktif	17 %		

Sumber : Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Pajak dan data diolah.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah perusahaan di Indonesia adalah sebanyak 22.300.000 yang setidaknya ada 12.900.000 perusahaan yang berpotensi untuk membayar pajak, namun ternyata perusahaan yang menyerahkan SPT Tahunan PPh Badan pada bulan April Tahun 2011 hanya 466.000 perusahaan, artinya rasio penyampaian SPT PPh Tahunan Badan terhadap badan usaha di Indonesia adalah sebesar 2,09% atau rasio penyampaian SPT Tahunan PPh Badan terhadap kelompok badan usaha yang berpotensi membayar pajak hanya sebesar

3,61%. Sedangkan dari 240.000.000 penduduk Indonesia menurut Biro Pusat Statistik (BPS) terdapat 110.000.000 orang pekerja. Dari 110.000.000 orang tersebut, diasumsikan bahwa yang mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah sekitar 50.000.000 pekerja, tetapi ternyata yang membayar pajak hanya 8.500.000 pekerja. Artinya, rasio SPT Tahunan PPh Orang Pribadi terhadap total kelompok pekerja aktif adalah sebesar 7,73%; atau rasio SPT Tahunan PPh Orang Pribadi terhadap kelompok pekerja yang diasumsikan memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) hanya sebesar 17%.

Menyadari masih sedikitnya Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga diperlukan terobosan untuk menggali potensi Wajib Pajak. Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkannya, maka pada tanggal 30 September 2011 Direktorat Jenderal Pajak menggelar program Sensus Pajak Nasional (SPN). Melalui program Sensus Pajak Nasional (SPN) masyarakat dihimbau untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka penggalan potensi Wajib Pajak. Selain itu, Sensus Pajak Nasional (SPN) bertujuan untuk mengamankan target penerimaan pajak dan penerimaan negara. (www.pajak.go.id).

Dengan kegiatan Sensus Pajak Nasional diharapkan dapat menarik minat masyarakat dalam ikut berpartisipasi, sadar dan peduli terhadap perpajakan Indonesia. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, dapat melaksanakannya sesuai kondisi atau potensi yang sebenarnya, mengingat pentingnya peranan pajak sebagai salah satu

sumber pendapatan yang utama. Apabila kegiatan tersebut berhasil menarik minat masyarakat, maka jumlah Wajib Pajak akan bertambah, sehingga diharapkan pendapatan negara akan semakin meningkat.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya berkaitan mengenai pengaruh Sensus Pajak Nasional terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan antara lain:

1. Penelitian Marianna Aprilia (2010) mengenai pengaruh kegiatan ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Variabel independen yang digunakan adalah kegiatan ekstensifikasi dan variabel dependennya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan atau menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega, dapat dikategorikan kurang baik yang ditunjukkan oleh hasil analisis koefisien korelasi *Pearson Product Moment* yang menghasilkan korelasi negatif sebesar 80,2% yang berarti terdapat hubungan yang tidak searah antara kegiatan ekstensifikasi dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
2. Penelitian Juliunus (2012) mengenai evaluasi program sensus pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan dan tingkat pertambahan wajib pajak. Variabel independen yang digunakan adalah program sensus pajak, sedangkan variabel dependennya adalah penerimaan pajak penghasilan dan tingkat pertambahan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program sensus pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua

dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, dapat dikategorikan mulai tahun 2009 hingga 2011 mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Berbagai penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian lebih lanjut temuan-temuan mengenai kegiatan Sensus Pajak Nasional (SPN), terutama yang berkaitan dengan kegunaannya dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

Dalam penelitian ini peneliti memilih Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees sebagai objek penelitian untuk mengadakan pengamatan dan penelitian dikarenakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan pusat pelayanan, penyuluhan, pengawasan bidang perpajakan yang berada di dalam wilayah wewenangnya berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku menurut Undang-undang.

Berkaitan dengan hal yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perbandingan Jumlah Wajib Pajak dan Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Sensus Pajak Nasional (Studi Kasus pada KPP Pratama Bandung Karees)**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada jumlah Wajib Pajak sebelum dan sesudah dilaksanakan program Sensus Pajak Nasional ?

2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada Penerimaan Pajak Penghasilan sebelum dan sesudah dilaksanakan program Sensus Pajak Nasional ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan terhadap jumlah Wajib Pajak sebelum dan sesudah dilaksanakan program Sensus Pajak Nasional.
2. Untuk mengetahui perbedaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan sebelum dan sesudah dilaksanakan program Sensus Pajak Nasional.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak dan aparat pajak sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan mengetahui upaya yang efektif untuk meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar sehingga penerimaan pajak penghasilan akan meningkat dengan bertambahnya jumlah wajib pajak terdaftar.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai kegiatan Sensus Pajak Nasional yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan pajak penghasilan.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya pada bidang perpajakan khususnya mengenai Sensus Pajak Nasional.